

**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020**

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2020 pada hari Selasa, 18 Mei 2021, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., dan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph.D., SCFA melalui *video conference*.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesepuluh kalinya (2011-2020). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun-tahun sebelumnya, BPK menyampaikan LHP sebanyak 3 buku, yaitu LHP atas Laporan keuangan yang berisi opini (Buku I), LHP atas Sistem Pengendalian Internal (Buku II), dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku III). Namun, mulai saat ini BPK menggabungkan Buku II dan Buku III, sehingga LHP yang disampaikan hanya 2 buku, yaitu Buku I dan Buku II.

Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya, dimana LHPnya berupa *Long Form Audit Report (LFAR)*. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK, sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

PRESS RELEASE

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB **cukup efektif** dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020.

Mataram, 18 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

